



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 23 Mei 2017

Halaman: 28

Dinas Pendidikan Tindaklanjuti Soal Intoleransi di Sekolah

Mahasiswa ISI menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan mengecek dugaan terjadinya praktik intoleransi di sekolah menengah pertama negeri di kota ini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori, mengatakan akan menindaklanjuti laporan pengaduan wali murid siswa SMP yang menjadi sasaran praktik intoleransi. Seorang siswa non-muslim sebelumnya dikatakan men-

dapat olok-an "kafir" dari teman sekolahnya. "Kami akan cek ke sekolahnya, benar atau tidak tentang pengaduan itu," kata Budi kemarin. Budi membantah ada kewajiban mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Selama ini, sekolah, kata dia, telah menanamkan pendidikan yang menjunjung perbedaan, membawa semangat kebangsaan, serta mengajarkan etika sopan santun di sekolah, perilaku hidup sehat, dan keteladanan. "Sudah ada pendidikan karakter yang diinternalisasi dengan mata pelajaran," kata

Budi. Sekolah juga telah menekankan bagaimana siswa bisa menerima perbedaan keyakinan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Supriyono, meminta semua sekolah menjaga keberagaman dan kerukunan, serta tidak sampai memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin memecah-belah, terutama di kalangan siswa.

Agung menuturkan, semua sekolah, baik swasta maupun negeri, harus memberi pemahaman kembali kepada siswanya ihwal ajaran pendiri bangsa Indonesia, Sukarno.

"Bahwa Indonesia bukan negara agama, wawasan kebangsaan ini harus ditekan kembali agar jangan ada aksi yang berpotensi memecah-belah," ujarnya kemarin.

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Antonius Rokki Ardiyanto, mengatakan pendidikan Pancasila seharusnya bisa masuk menjadi kurikulum SD hingga SMP. Sekolah-sekolah negeri, kata dia, seharusnya menjadi lembaga yang bisa memelihara nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, sehingga siswa bisa saling menghormati di antara umat beragama. Sebelumnya, Antonius

mendapat laporan terjadinya intoleransi siswa di sejumlah sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri di Yogyakarta yang membuat aturan yang mengarah ke perilaku intoleran.

Pemerintah DIY menegaskan tidak memberikan sepeser pun alokasi anggaran daerah bagi ormas-ormas yang terindikasi melakukan aktivitas atau gerakan radikalisme. Termasuk organisasi yang baru saja dibubarkan pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Kami tidak pernah mengeluarkan anggaran daerah untuk kelompok seperti itu," kata Agung. Kemarin, mahasiswa

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di kampus mereka. Organisasi yang akan dibubarkan pemerintah itu diduga banyak melakukan aktivitas di dalam kampus. Bahkan ada indikasi dua dosen di perguruan tinggi seni itu terlibat aktif dalam organisasi ini. Ratusan mahasiswa dan alumnus menggelar unjuk rasa di gedung rektorat kampus. "ISI harus bersih dari paham yang bertentangan dengan kebinekaan, organisasi yang tidak berdasarkan Pancasila," kata Yoyok Suryo, koordinator aksi.

● SINTA MAHARANI | PRIBADI WICAKSONO
I MUI SINAFILLAN

1.
2.
3.
4.
5.

Lanjutan
Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005